Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh

Cut Rusmina Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah cut.rusmina@serambimekkah.ac.id.

Sarboini

Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah sarboinise@serambimekkah.ac.id

Maryam

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah maryam@serambimekkah.ac.id

Cut Hamdiah

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah cut.hamdiah@serambimekkah.ac.id

Riska Isnanda

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah riskaisnanda@gmail.com

Article's History:

Received 25 April 2023; Received in revised form 9 Mei 2023; Accepted 20 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Rusmina, C., Sarboini., Maryam., Hamdiah, C., & Isnanda, R. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (3). 930 – 936. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1208

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh. Populasi penelitian ini berjumlah 141 responden dari SKPK Kota Banda Aceh. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Setiap satu SKPK diwakili 3 responden yang mengerti dan memahami anggaran dan kinerja SKPK Kota Banda Aceh yang berasal dari SKPK Kesekretariatan, Kantor, Badan, Dinas, Kecamatan dan Unit kerja. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil SKPK dari Sekretariat, Dinas dan Badan yang berjumlah 30 SKPK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 90 responden dari Sub Bagian Keuangan, PPK, dan Bendahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh, yaitu sebesar 26,4%. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh yaitu sebesar 41,4%. Desentralisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh yaitu sebesar 19,9%. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh yaitu sebesar 22,7%.

Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentraslisasi, Ketidakpastian Lingkungan, Kinerja

Pendahuluan

Setiap instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menetapkan prioritas dan sasaran strategis dari program kerja dalam menetapkan anggaran yang ingin dicapai secara berkelanjutan, serta harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan satuan kerja perangkat daerah dalam pelayanan publik, pembangunan serta administrasi pemerintah yang tertuang dalam program kerja

anggaran ditentukan oleh peran kinerja setiap perangkat. Peran dan keterlibatan pimpinan dalam upaya memberikan dukungan untuk dapat merencanakan program kerja yang berkualitas, melaksanakan realisasi proyek secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadinya penyimpangan. Semuanya ditentukan oleh peran serta kinerja perangkat daerah di berbagai bidang.

Kinerja perangkat daerah adalah ukuran seberapa efektif dan efisien perangkat daerah telah bekerja dalam mencapai tujuan organisasi [1]. Kinerja dapat didefinisikan juga sebagai performance yang merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi [2]. Dalam hal ini kinerja perangkat daerah khususnya perangkat daerah Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tingkat capaian yang dapat direalisasi sehingga bisa melihat ukuran efektif dan efisien sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2017	985,975,685,419.0090	5,808,725,719.00	91.87
2	2018	1,194,481,738,323.001,	096,156,567,907.00	91.77
3	2019	1,329,366,899,560.001,	189,391,758,858.00	89.47

Sumber: LAKIP Kota Banda Aceh, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kinerja pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2017 realisasi anggaran mencapai 91,87% walaupun di tahun 2018 sedikit mengalami penurunan sebesar 91,77% (turun sebesar 0,1%), namun masih berada pada kategori efisien. Tetapi pada tahun 2019 realisasi anggaran menurun menjadi 89,47%. Selama tiga tahun terakhir Pemerintah Kota Banda Aceh beserta jajarannya (SKPK) hanya mampu merealisasikan anggaran pada kegiatan rutin seperti belanja operasional, sedangkan pada belanja modal ,kegiatan dan program pembangunan, pemerintah kota Banda Aceh tidak mampu merealisasikan anggaran secara maksimal. Tahun 2018 rencana pembebasan tanah di kawasan Kecamatan Ulee Kareng (SKPK Dinas PU Bina Marga) yang diperuntukkan untuk pelebaran jalan hanya mampu terealisasi sebesar 23,84%. Begitu juga halnya dengan belanja modal pada rencana pengadaan peralatan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, telah merencanakan untuk pengadaan peralatan yang menunjang kegiatan masyarakat, namun dari nominal yang direncanakan dan dianggarkan hanya sebesar 67,04% yang mampu direalisasikan, sementara program dan kegiatan tersebut sangatlah penting demi kelanjutan dan kehidupan masyarakat yang membutuhkan (BPK Kota Banda Aceh, 2020).[3].

Penurunan realisasi anggaran di tahun 2019 tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor kinerja perangkat dan peran pimpinan atau kinerja yang juga menurun. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja SKPK diantarnya dipengaruhi oleh akuntabilitas publik, sistem pengendalian manajemen, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan [4] [5] [6]. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga variabel, yaitu kejelasan sasaran anggaran, desentraliasi dan ketidakpastian lingkungan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti dan juga sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran anggaran tersebut [5]. Dalam SKPD, yang dimaksud dengan manajer adalah kepala bagian yang membidangi satu bidang tertentu. Kinerja dari kepala bagian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan. Sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti sebagai sarana pertanggungjawaban dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran [5]. Program kerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh harus memiliki tingkat kejelasan sasaran anggaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tepatnya sasaran anggaran berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan program yang menunjang kinerja SKPK secara umum di Pemerintahan Kota Banda Aceh, khsususnya yang menyentuh langsung

kemaslahatan umat, realisasinya masih sangat kurang. Hasil penelitian menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja [4] [6] [7].

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja adalah desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pengambilan keputusan pada tingkatan organisasi yang lebih rendah [8]. Dalam pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi merupakan tugas pemerintahan di daerah yang ditujukan untuk memberikan kewenangan kepada daerah guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat [9]. Tujuan penyerahan kewenangan dalam tugas-tugas pemerintahanberbentuk desentralisasi diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yangakomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun dan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah, sehingga keberadaan pemerintah daerah akan semakin bermakna dan pada akhirnya dapat meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada publik [9]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja [4] [5].

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi lingkungan eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi operasionalisasi sebuah lembaga atau organisasi. Ketidakpastian lingkungan meliputi banyak hal, salah satunya regulator, teknologi, keamanan dan bencana alam. Ketidakpastian lingkungan yang bersifat internal seperti mutasi pegawai yang tiba-tiba atau mendadak. Dalam hal ini manajer ataupun kepala bagian harus memiliki perencanaan yang cukup dalam menghadapi berbagai hal yang mungkin terjadi. Hasil penelitian menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja [6].

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. Objek penelitian adalah SKPK Kota Banda Aceh yang terdiri dari Kesekretariatan, Kantor, Badan, Dinas, Kecamatan dan Unit kerja. Populasi penelitian ini berjumlah 141 orang responden, setiap satu SKPK diwakili 3 orang responden yang mengerti dan memahami anggaran dan kinerja manajerial. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil SKPK dari Sekretariat, Dinas dan Badan yang berjumlah 30 SKPK, sehingga sampel yang ditetapkan sebanyak 90 orang responden, dengan asumsi setiap SKPK diwakili 3 orang, yang diambil dari sub bagian keuangan, PPK, dan Bendahara. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan. Skala yang digunakan adalah skala likert, dengan pernyataan pada skala 5 titik [10]. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_1) , desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3) . Variabel terikat adalah kinerja (Y). Rancangan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas serta uji F dan uji t.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linier

Pengujian analisis linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran (X_1) , desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3) . terhadap variabel dependen yaitu kinerja manajerial (Y). Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant) Kejelasan Sasaran	1,422	,640		2,223	,029
	Anggaran	,414	,078	,495	5,330	,000
	Desentralisasi Ketidakpastian	,199	,084	,110	2,369	,024
	Lingkungan	,227	,097	,123	2,340	,027

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS Versi 22.0, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,422 + 0,414 X_1 + 0,199 X_2 + 0,227 X_3 + \varepsilon$$

Koefisien korelasi dan determinasi

Untuk melihat hubungan dan pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja berdasarkan korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Model Summary

			Adjusted R	Std. Error of the	
Model	R	R Square	Square	Estimate	
1	,514ª	,264	,239	,2938	

- a. Predictors: (Constant), Ketidakpastian Lingkungan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi
- b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Koefisien korelasi (R) = 0,514 menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 51,4%. Artinya kinerja SKPK Kota Banda Aceh (Y) memiliki hubungan yang cukup erat dengan faktor kejelasan sasaran anggaran (X_1), desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,264. Artinya sebesar 26,4% Kinerja SKPK Kota Banda Aceh dapat dijelaskan oleh faktor kejelasan sasaran anggaran (X_1), desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3), sedangkan selebihnya yaitu sebesar 73,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini, seperti kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan pegawai, kondisi lingkungan kerja dan budaya kerja, serta faktor-faktor lain-lain yang dianggap sesuasi dalam mempengaruhi kinerja.

Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji simultan dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran (X₁), desentralisasi (X₂) dan ketidakpastian lingkungan (X₃) berpengaruh terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4 Analisis of Variance (Anova) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,667	3	,889	10,298	,000b
	Residual	7,423	86	,086		
	Total	10,090	89			

- a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial
- b. Predictors: (Constant), Ketidakpastian Lingkungan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi

Pengujian Anova dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pada Tabel 1.4 menunjukkan F_{hitung} sebesar 10,298, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi α = 5% adalah sebesar 2,172. Dari perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa F_{hitung} > F_{tabel} (10,298 > 2,172), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha (Hipotesis alternative) diterima dan menolak Ho (Hipotesis nol), artinya bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPK Kota Banda Aceh. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara, kejelasan sasaran anggaran (X_1), desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3), dengan demikian hipotesis alternatif (X_1), desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3), dengan demikian hipotesis alternatif (X_1), desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3), dengan demikian hipotesis alternatif (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3), dengan demikian hipotesis alternatif (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3), dengan demikian hipotesis alternatif (X_3) yang diajukan diterima dan menolak hipotesis nol (X_3), karena diperoleh nilai X_3 0, dengan tingkat probabilitas X_3 1, dengan tingkat probabilitas X_3 2, dengan tingkat probabilitas X_3 3, dengan tingkat probabilitas X_3 3, dengan tingkat probabilitas X_3 4, dengan tingkat probabilitas X_3 5, dengan tingkat probabilitas X_3 5, dengan tingkat probabilitas X_3 5, dengan tingkat probabilitas X_3 6, dengan tingkat probabilitas X_3 8, dengan tingka

Pengaruh Kejelesan Saaran Anggaran, Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja SKPK

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefesien korelasi atau R adalah sebesar 0,514. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) , desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3) secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh. Nilai 0,514 menunjukkan hubungan yang sedang. Nilai R Square adalah sebesar 0,264 yang berarti besarnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X_1) , desentralisasi (X_2) dan ketidakpastian lingkungan (X_3) terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh adalah sebesar 26,4%. Sisanya sebesar 73,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPK

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja SKPK Kota Banda Aceh sekaligus dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah dengan tepat dan efisien. Kejelasan sasaran anggaran di SKPK Kota Banda Aceh memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial, ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran di SKPK Kota Banda Aceh sudah cukup baik, sehingga kinerja pun menjadi lebih efektif dan efesien. Besarnya nilai koefisien variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu sebesar 0,414, artinya setiap kenaikan 100% perubahan dalam variabel kejelasan sasaran anggaran secara relatif meningkatkan kinerja SKPK Kota Banda Aceh sebesar 41,4. Penetapan tujuan anggaran yang lebih jelas dan spesifik akan lebih dapat memberikan hasil bagi organisasi [11]. Kejelasan sasaran anggaran dapat memotivasi para karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja mereka, karena mereka tahu tujuan yang diharapkan pemerintah dalam penyusunan anggaran tersebut. Kejelasan anggaran juga dapat diintepretasikan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut serta dalam proses pelaksanaannya lebih terarah [5].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah yang menjadi salah satu tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparatur pemerintah daerah terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran [4]. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi

Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang) [6]. Dari kedua penelitian ini dapat dikemukakan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang direncanakan, maka semakin meningkat kinerja SKPK.

Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja SKPK

Desentralisasi berpengaruh tehadap kinerja SKPK dengan besaran koefisien sebesar 0,199 artinya setiap kenaikan 100% perubahan dalam variabel desentralisasi secara relatif meningkatkan kinerja SKPK sebesar 19,9%. Desentralisasi atau pendelegasian wewenang yang terstruktur dengan baik turut serta meningkatkan kinerja SKPK. Pendelegasian wewenang dapat membantu aparatur daerah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya di masing-masing bagian atau divisi, sehingga kinerja SKPK akan lebih maksimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Desentralisasi diartikan sebagai praktik pendelegasian wewenang dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak manajer atau pimpinan dalam suatu instansi [12]. Perwujudan desentralisasi biasanya melalui unit-unit yang disebut divisi.

Desentralisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mencapai kinerja SKPK di setiap instansi pemerintah daerah maupun kota, hal ini terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan oleh setiap aparatur daerah dan kota untuk menangani kondisi-kondisi khusus di daerahnya masing-masing. Struktur organisasi memiliki peran penting terhadap kinerja pada tingkat organisasi atau tingkat sub-unit [13]. Selain beberapa teori tersebut, hasil penelitian lainnya menjelaskan bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja [4] [6].

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja SKPK

Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja SKPK Kota Banda Aceh. Ketidakpastian lingkungan merupakan tingkat (laju) perubahan serta kompleksitas yang terjadi di lingkungan tersebut, dalam hal ini adalah lingkungan SKPK Kota Banda Aceh. Besarnya koefisien variabel ketidakpastian lingkungan yaitu sebesar 0,227, artinya setiap kenaikan 100% perubahan variabel ketidakpastian lingkungan secara relatif meningkatkan kinerja SKPK Kota Banda Aceh sebesar 22,7%. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja. Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi lingkungan eksternal dan maupun internal yang dapat mempengaruhi aktivitas sebuah lembaga atau suatu instansi [14]. Ketidakpastian lingkungan meliputi banyak hal, salah satunya regulator, teknologi, keamanan dan bencana alam. Ketidakpastian lingkungan yang bersifat internal meliputi mutasi pegawai yang tiba-tiba atau mendadak. Dalam hal ini pimpinan ataupun kepala bagian harus memiliki perencanaan yang matang dalam menghadapi berbagai hal yang mungkin terjadi. Ketidakpastian lingkungan dapat diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan juga pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja [6].

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial pada SKPK Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial pada SKPK di Kota Banda Aceh yaitu, sebesar 26,4%.
- Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial pada SKPK di Kota Banda Aceh. Hal ini menegaskan bahwa, jika semakin baik kejelasan dari suatu anggaran, maka semakin baik pula kinerja manajerial, begitu pula sebaliknya. Kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian ini mampu mempengaruhi kinerja manajerial sebesar 41,4%.
- 3. Desentralisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial pada SKPK di Kota Banda Aceh. Hal ini menegaskan bahwa, jika semakin baik desentralisasi yang diterapkan di lingkungan kerja SKPK Kota Banda Aceh, maka semakin baik pula kinerja manajerial, begitu pula sebaliknya. Desentralisasi dalam penelitian mampu mempengaruhi kinerja manajerial sebesar 19,9%.
- 4. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial pada SKPK di Kota Banda Aceh. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin baik prediksi dan antisipasi terhadap ketidakpastian lingkungan, maka semakin baik pula kinerja manajerial, begitu pula sebaliknya. Ketidakspastian lingkungan dalam penelitian ini mampu mempengaruhi kinerja manajerial sebesar 22,7%.

Daftar Pustaka

- [1] Gozali, Mareta Chrisna. (2012). Dampak Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Pada Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 1. (3): 44-48. https://doi.org/10.33508/jima.v1i3.
- [2] Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [3] https://aceh.bpk.go.id.
- [4] Putra, Deki. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah, Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangakat Daerah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi FEUNP.* 2. (1): 1-18.
- [5] Hidayat, Taufik. (2015) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. 8. (2): 148-161. https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2769.
- [6] Hazmi, Yusri. dkk. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan Kota Lhokseumawe Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 13. (2): 31-37.
- [7]Sari, Kurnia. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran Anggaran dan sistem pengendalian manajemen Terhadap kinerja manjerial SKPD di kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Program Studi Akuntansi*. UMYS.
- [8] Handoko. (2017). Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. Liberty.
- [9] Oentarto, dkk. (2018). Menggagas Format Otonomi Daerah Masa depan. Samitra Media Utama. Jakarta.
- [10]Sekaran, Uma. (2018). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta. Salemba Empat.
- [11] Ridwan, M dan Mus'id (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas di Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. 12. (2): 222-241. http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v12i2.
- [12] Hansen & Mowen . (2014). Manajemen Biaya. Buku Kedua. Jakarta. Salemba Empat.
- [13] Nazaruddin, letje dan Henry Setyawan. (2011). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi. Journal of Accounting *and investment*. 12. (2): 197-207.
- [14] Sabran dan Barnadi, (2018). Manajemen, Jilid 1 Edisi 13. Jakarta: Erlangga.